

# **KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENUTUP KANTOR PERWAKILAN PLO DI WASHINGTON DC TAHUN 2018**

Ade Kurnia Al Ridho  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta  
Email: adekurnia057@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan Donald Trump menutup kantor perwakilan PLO dan faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan Donald Trump. Metodologi Penelitian yaitu Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di dapat merupakan berupa kajian pustaka atau library research, website, video, berbagai tulisan dan berbagai data yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi PLO yang didirikan sebagai entitas politik yang akan mewakili kepentingan Palestina yang berfungsi secara independen dari pemerintah Arab, awalnya sebuah organisasi yang bergerak dengan perjuangan fisik. Kedekatan Trump Dengan Lobi-Lobi Yahudi Dan Israel, Profil Trump Presiden Amerika, Organisasi Yahudi di Amerika ada tiga kelompok lobi pro-Israel yang memiliki pengaruh besar dalam melobi pembuat kebijakan luar negeri di AS. Tiga di antaranya adalah AIPAC, ADL dan ZOA. Kedekatan Trump dengan Lobi Yahudi, Kedekatan Trump dengan Yahudi juga ditunjukkan dalam kabinet dan penasehatnya yang berisi orang di Yahudi.

Kata Kunci: Kebijakan Donald Trump, Kantor Perwakilan PLO

## **ABSTRACT**

The research objective is to find out Donald Trump's policy of closing the PLO representative office and the factors that influence Donald Trump's policy. Research Methodology namely This research is a descriptive study. Data collection techniques that can be in the form of library research or library research, websites, videos, various writings and various data related to the research topic. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the PLO Organization was established as a political entity that would represent the interests of Palestine that functioned independently from the Arab government, initially an organization engaged in physical struggle. Proximity of Trump to Jewish and Israeli lobbies, Trump Profile American President, Jewish organizations in America there are three pro-Israel lobby groups that have a big influence in lobbying foreign policy makers in the US. Three of them are AIPAC, ADL and ZOA. Proximity of Trump to the Jewish Lobby, Trump's Proximity to Jews is also shown in the cabinet and his advisory which contains people in Jews.

Keywords: Donald Trump Policy, PLO Representative Office

## PENDAHULUAN

Pada konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) khususnya ke Timur Tengah, situasi politik dalam negeri amat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Louis Fawcett (Fawcett, 2005: 297) memaparkan bahwa ada enam elemen dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri AS, yaitu *The White House, The Executive Branch, The Legislative Branch, Political Parties, Opinion Makers dan The Lobbies*. Dari keenam elemen tersebut, peneliti menyoroti kelompok pelobi dalam penelitian ini. Gabriel Almond memaparkan bahwa para pelobi tergabung ke dalam jenis kelompok kepentingan yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya melalui lobi kepada pemerintah (Almond, 1974: 47). Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa kelompok kepentingan adalah organisasi domestik yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah tanpa mengesampingkan keberadaan publik.

Kelompok lobi yang sangat berperan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah adalah mereka yang pro-Israel (Mearsheimer, 2008:307). John Mearsheimer mendeskripsikannya sebagai kelompok lobi Israel. Tiga di antara kelompok lobi Israel terkuat adalah *The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Anti-Defamation League (ADL)* dan *The Zionist Organization of America (ZOA)*. Ketiganya adalah kelompok lobi yang memiliki pengaruh kuat serta dapat memengaruhi kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif di AS. Kelompok lobi Israel memiliki peran untuk melindungi eksistensi Israel melalui kekuatan politik AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contoh kelompok lobi Israel yang pernah dilakukan adalah keputusan pemerintah AS memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mewajibkan Israel untuk melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan pada saat konflik Israel Hisbullah.

PLO merupakan sebuah kantor perwakilan yang didirikan pada tahun 1964 untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina menjadi satu wadah. PLO adalah sebuah organisasi yang berusaha mewujudkan hak hak Palestina terhadap Israel dengan cara mengutip perjanjian, resolusi resolusi Dewan Nasional Palestina yang mana dahulu Palestina merupakan suatu negara. PBB telah menyatakan bahwa integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (*International Court Justice*) dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Nasional PBB. Jadi, dalam kasus Palestina, keterbatasan kontrol terhadap wilayahnya tidak mengaburkan makna tetap atau berintegritas sebagaimana disyaratkan oleh kriteria Definisi Territori karena hal itu terjadi akibat adanya pendudukan negara asing (Israel).

"Pemerintahan Trump tidak akan membiarkan kantor tersebut tetap terbuka sementara pihak Palestina menolak untuk memulai negosiasi langsung....," ungkap Bolton, menurut rancangan pidatonya Bolton juga dilaporkan akan mengancam Pengadilan Pidana Internasional dengan sanksi jika melakukan penyelidikan terhadap AS dan Israel, Keputusan tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara AS dan para pemimpin Palestina, yang telah memutuskan komunikasi dalam perundingan damai setelah Trump mengumumkan pemindahan Kedutaan AS di Israel ke Yerusalem.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Mengapa Donald Trump menutup kantor perwakilan PLO di Washington DC tahun 2018?

## Kerangka Teori

Untuk membuat sebuah tulisan ilmiah dibutuhkan suatu kerangka pemikiran berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian sesuai dengan research question untuk menyesuaikan sebuah Teori yang relevan dengan penelitian sehingga penelitian dapat mudah di lakukan.

Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. dan kepentingan tersebut dapat berubah kepentingan internasional ketika suatu negara tersebut menginginkan sebuah tujuan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antar negara negara lain yang memiliki tujuan bersama . kepentingan tersebut dapat di capai melalui tindakan atau usaha usaha yang dilakukan oleh para aktor aktor internasional yang biasanya dapat berupa sebuah kebijakan kebijakan yang dibuat oleh para aktor tersebut.

Kebijakan luar negeri pada dasarnya tidak pernah terlepas dari pengaruh politik domestik. Seperti yang dipaparkan oleh Kissinger (1969: 262) bahwa kepentingan nasional berangkat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Banyak yang beranggapan bahwa kebijakan domestik berakhir ketika kebijakan luar negeri dimulai. Namun anggapan tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena politik domestik mempunyai peran yang penting dalam isu-isu internasional. Output yang dihasilkan dalam suatu kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh seberapa rumit struktur politik domestik. AS memiliki sistem politik demokrasi sehingga memungkinkan keberadaan kelompok lobi berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri dihasilkan oleh unsur-unsur domestik seperti eksekutif, legislatif, badan-badan eksekutif dan pengaruh dari kelompok kepentingan atau pelobi (Duncan dkk, 2003:187). Kebijakan politik domestik sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri terutama pada era globalisasi saat ini. Salah satu contohnya adalah kelompok kepentingan di tatanan domestik akan berusaha untuk melobi pengambil kebijakan agar kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingannya (Kegley & Witkoff, 2004: 74). Lovell mengklasifikasikan input atau masukan ke dalam dua bagian yaitu internal dan eksternal (Lovell, 1970: 210). Input internal adalah informasi yang datang dari dalam pemerintah itu sendiri sedangkan input eksternal adalah informasi yang datang dari luar negara. Setiap input yang ada tersebut adalah informasi yang banyak dan belum terseleksi dengan baik mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. Lazimnya informasi yang ada di dalam input tersebut adalah demand (permintaan), opinion (opini), interest (kepentingan) dan needs (kebutuhan). Pada penelitian ini, input yang akan dibahas adalah kepentingan.

Aktivitas lobi pada intinya adalah sebuah fenomena gunung es antara pemerintah dengan kelompok kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Fawcett, 2005: 297). Secara teori, kelompok lobi tergolong ke dalam kelompok kepentingan. Kelompok lobi memiliki beberapa kriteria diantaranya adalah cultural interest group, business interest group, workers' interest group dan issue specific group (Rourke, 1991: 131). Penelitian ini akan memfokuskan pada cultural interest group. Kelompok lobi ini mewakili etnis, agama ataupun ras tertentu untuk melobi suatu negara atau pemerintahan. Di beberapa negara, kelompok lobi lazimnya memiliki kedekatan dengan partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan (Fawcett, 2005: 298). Dalam penelitian ini, cultural interest group adalah kelompok lobi yang mewakili gerakan politik zionisme berbasis pada paham agama, ras, dan etnis.

Efektivitas lobi Yahudi ini ditentukan dengan memanfaatkan informasi sebagai salah satu upaya melobi elite-elite politik. Pada negara yang menganut sistem terbuka, keterbukaan informasi dan kebebasan berbicara memungkinkan pelobi mempunyai kebebasan untuk mendukung kandidat politik serta memarginalkan oposisi (Mearsheimer, 2008: 140). Kekuatan lobi tersebut diperkuat pula oleh argumen Lovell bahwa tujuan utama dari lobi adalah membentuk opini yang berasal dari informasi agar disesuaikan sedemikian rupa sehingga para pengambil kebijakan pun mau atau terpengaruh oleh lobi mereka (Lovell, 1970: 257). Secara deskriptif, dampak dari lobi dapat terlihat secara nyata ataupun tidak. Hal ini dapat menimbulkan kebijakan yang berstandar ganda karena keputusan yang diambil

perumusan kebijakan akan berseberangan dengan kepentingan nasional mereka ataupun norma dan hukum internasional.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tipe penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku dalam dampak terjadinya kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Penelitian ini dilakukan dengan cara upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi kondisi tersebut yang saat ini sedang terjadi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di dapat merupakan berupa kajian pustaka atau library research, website, video, berbagai tulisan dan berbagai data yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan kualitatif yaitu, yang focus pada pemahaman keadaan social dari sudut pandang partisipan, namun tidak melupakan teknik analisis kuantitatif yang terdiri dari dua sudut pendekatan yaitu, kuantitatif deskriptif dan kuantitatif inferensial. Teknik penelitian tersebut memungkinkan penulis untuk melakukan pendeskripsian keadaan suatu akibat yang telah terjadi karena kebijakan yang dilakukan Donald Trump tersebut serta juga tidak lupa juga megeneralisasikan kondisi tersebut secara lebih luas.

### **Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan deduktif, dimana penulis menggambarkan hal hal yang khusus untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh contoh kongkrit atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi mengenai hal yang di dibahas oleh penulis.

## **ANALISIS**

### **KEDEKATAN TRUMP DENGAN LOBI-LOBI YAHUDI DAN ISRAEL**

#### **1. Profil Trump Presiden Amerika**

Trump terlahir sebagai anak keempat dari lima bersaudara, orang tuanya adalah Fred Trump dan Mary Anne MacLeod Trump. Ibu Trump, Mary adalah imigran dari Skotlandia, pada tahun 1929 tepatnya umur 17. Lalu menikah pada tahun 1936 dengan ayah Trump. Pada tahun 1950 kehidupan ekonomi keluarga Trump meningkat drastis dan menjadikan ibunya sebagai sosialita filantropis di kalangannya. Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Kota New York, Amerika. Trump lahir di masa kejayaan ayahnya yang bekerja sebagai seorang kontraktor yang telah membangun beberapa apartemen di Wilayah Queens, Brooklyn, dan Staten Island untuk masyarakat dengan kelas ekonomi tingkat atas (Admojo, 2013).

Berbagai karakteristik menyimpang Trump tersebut, tidak lain dikarenakan Trump secara umum mengalami kekacauan, yaitu RAD (*Reactive Attachment Disorder*) (Academy, 2017). RAD adalah sebuah kondisi psikologis yang disebabkan oleh absensi kehadiran orang tua, terutama ibu. Dalam hal ini, kondisi psikologis anak akan mencari kehadiran, perhatian, dan keamanan yang tidak didapatkan ketika seorang individu kecil hingga dewasa. Hal ini menyebabkan anak menjadi seseorang yang narsistik, tidak dapat membedakan baik dan buruk, benar salah, atau kawan dan lawan, hingga tidak dapat menerima saran dari orang lain, dan membangkang. Serta membuat seorang anak yang merasa terabaikan dan ditinggalkan menjadi seorang yang suka merendahkan atau suka membully orang lain. RAD menjadi sangat krusial, karena anak akan memosisikan diri sebagai *anti-dependent* atau tidak bisa mengakui kebutuhannya akan kehadiran orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang ia tidak ketahui. Hal tersebut adalah hal alamiah yang dilakukan manusia dan untuk melakukan perlindungan dari lingkungan sosial, seseorang akan menunjukkan sikap yang ambivalen dari apa yang sebenarnya ia rasakan (Admojo, 2013).

Pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu merupakan kontestasi politik yang mengejutkan, hal ini karena bergabungnya Donald Trump sebagai tokoh yang cukup kontroversial dari partai republik yang secara langsung melawan Hillary Clinton dari partai Demokrat. Pada pemilihan presiden tahun 2016 tersebut menawarkan visi berbeda dan sering bersaing mengenai berbagai isu, seperti ekonomi, militer, kebijakan luar negeri, dan isu-isu domestik lainnya. Polarisasi antara partai Republik dan Demokrat juga terjadi pada saat pemilu (MEE, 2016).

Salah satu yang menarik dari pemilihan umum 2016 yaitu adalah kedua kandidat tersebut seringkali memiliki visi yang bertolak belakang, namun kedua kandidat tersebut kompak untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel, sementara seringkali mengesampingkan hak Palestina. Hal ini terlihat jelas dalam visi mereka di ranah kebijakan luar negeri, khususnya yang menyangkut konflik Palestina-Israel. Pihak dari partai Demokrat maupun Republik sepakat dengan visi yang sama, yaitu, Israel akan diberi dukungan finansial, militer dan diplomatik tanpa syarat, dan pihak Palestina sering di kesampingkan atau tidak pernah ditangani secara substansial, dan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Selain itu sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun kandidat calon presiden yang akan maju, selalu ada campur tangan pelobi AIPAC dan harus menyertakan kepentingan Israel meskipun disisi lain Amerika Serikat juga menjadi mediator dari konflik Palestina dengan Israel.

Terpilihnya Presiden Donald Trump menggantikan Barrack Obama menjadi titik balik dari kebijakan Amerika Serikat tentang perdamaian Palestina dengan Israel. Presiden yang diusung dari Partai republik tersebut memiliki kebijakan yang ekstrim dan berbanding terbalik dengan yang telah dilakukan Presiden sebelumnya, hal ini didasari kedekatannya dengan kaum Kristen Evangelis dan juga sikap politiknya yang pro Israel. Hal ini dibuktikan dengan janji kampanye yang diutarakan Donald Trump pada para pelobi Israel, tentang usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, dan juga memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem diwujudkan Perseiden Donald Trump secara terbuka pada bulan Desember 2017. Hal ini mengejutkan banyak pihak, terlebih lagi pihak Palestina.

## **2. Organisasi Yahudi di Amerika**

Ada tiga kelompok lobi pro-Israel yang memiliki pengaruh besar dalam melobi pembuat kebijakan luar negeri di AS. Tiga di antaranya adalah AIPAC, ADL dan ZOA. Ketiganya merupakan lembaga lobi terbesar yang mampu mempunyai akses untuk melobi Kongres dan Senat serta memiliki pengaruh di media massa yang bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Israel melalui kebijakan luar negeri AS (Findley, 1990).

### **a. AIPAC (*Amerikan Israel Public Affairs Committee*)**

Amerika Serikat dipilih sebagai negara yang menjadi tempat diaspora Yahudi mengingat power dan pengaruh yang dimiliki oleh negara tersebut sangatlah kuat. Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk mempengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis penjualan senjata ke negara Arab dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan militer Pentagon dan Israeli Defensive Force (IDF). AIPAC adalah lobi etnis paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Pengaruhnya dapat dirasakan di Gedung Putih, Pentagon dan Capitol Hill. Peran AIPAC dalam melobi para pembuat kebijakan baik Kongres, Senat ataupun presiden sebagai eksekutif sangatlah signifikan. Sebagai satu-satunya kelompok lobi pro-Israel yang mampu bersaing di antara lobi-lobi lainnya, AIPAC hanya menempati urutan kedua dalam kemampuan melobi setelah Yayasan Pensiunan AS (Mearsheimer, 2008).

Lobi yang dilakukan oleh AIPAC mampu menjembatani antara kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan kelompok lobi. Penerapan kebijakan luar negeri yang pro-Israel maka Amerika Serikat telah bertindak sesuai dengan “kepentingan nasional” mereka. Pada dasarnya visi dan misi organisasi lobi pro-Israel bertujuan untuk mengedukasi para anggota Kongres, Senat, cendekiawan ataupun mahasiswa dan profesional media bahwa hubungan bilateral antara AS-Israel adalah sesuatu yang sangat krusial (Mearsheimer, 2008).

b. ADL (*Anti-Defamation League*)

ADL (*Anti-Defamation League*) yaitu organisasi Yahudi atau Liga Anti-Fitnah (LAF), yang awalnya dikenal sebagai Liga Anti-Fitnah B'nai B'rith, adalah sebuah organisasi non-pemerintahan Yahudi internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai "agensi hubungan manusia/hak asasi sipil utama di negara tersebut", LAF menyatakan bahwa organisasi tersebut "melawan anti-Semitisme dan seluruh bentuk kefanatikan, mempertahankan pemikiran demokratik dan melindungi hak asasi sipil untuk seluruh masyarakat," melalui "informasi, pendidikan, legislasi, dan advokasi (www.voaindonesia.com, 2018).

Didirikan pada Oktober 1913 oleh Ordo Independen B'nai B'rith, sebuah organisasi layanan Yahudi di Amerika Serikat, pernyataan misi aslinya adalah "untuk menghentikan pemfitnahan orang Israel, dengan membandingkan alasan dan hati nurani dan, jika perlu, melalui hukum banding. Keperluan utamanya adalah untuk melindungi keadilan dan pernyataan adil kepada seluruh warna negara dan untuk selamanya mengakhiri ketidakpastian dan diskriminasi yang tidak adil melawan sekte atau badan warga negara apapun." LAF memiliki 29 kantor di Amerika Serikat dan tiga kantor di negara lainnya, dengan markas besarnya terletak di New York City. Abraham Foxman menjadi direktur nasional-nya sejak 1987. Pada November 2014, diumumkan bahwa Jonathan Greenblatt akan menggantikan Foxman sebagai direktur nasional pada Juli 2015. Ketua nasional-nya adalah Barry Curtiss-Lusher.

Liga Anti-Fitnah telah menuai kritikan dan kontroversi terkait prioritasnya. Noam Chomsky menuduh organisasi tersebut "kehilangan fokus mereka secara keseluruhan terhadap masalah hak-hak sipil dalam rangka menjadi advokat untuk kebijakan Israel". Jurnalis Mark Arax mengkritik kegagalan organisasi tersebut untuk mengakui Genosida Armenia.

c. ZOA (*Zionist Organization of America*)

ZOA adalah organisasi Zionis pertama di AS yang berdiri pada tahun 1897 dengan anggota yang mencapai lebih dari 25 ribu. Mereka memberikan dukungan penuh saat Deklarasi Balfour lahir pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah dukungan resmi Inggris untuk pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi, dengan demikian bisa dianggap sebagai bibit realisasi proyek Zionisme. Saat negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, ZOA memobilisasi dukungan baik dari kalangan pemerintah, kongres, maupun masyarakat AS untuk memberikan dukungannya. Mereka mengkritik penunjukan George W. Mitchell sebagai utusan AS untuk Timur Tengah pada tahun 2009 karena Mitchell dinilai kurang pro-Israel. Mereka juga mendesak Kongres AS untuk mengetatkan sanksi untuk Iran sekaligus menuntut transparansi penuh untuk dana bantuan kemanusiaan AS untuk warga Palestina.

Dengan demikian, pada hari di mana Trump mengejutkan dunia dengan klaim sepihaknya terkait status Yerusalem, ZOA merilis dukungan yang di laman resminya dengan judul “ZOA Memuji Presiden Trump karena Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Rencana Memindahkan Kedutaan Besar ke Sana”. Isinya berisi argumen teologis hingga politis untuk menguatkan keputusan Trump yang sesungguhnya melabrak aturan internasional dan dikecam hampir seluruh politisi dunia (tirto.id, 2018).

### **3. Kedekatan Trump dengan Lobi Yahudi**

Perubahan kepemimpinan Presiden Trump menutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang telah aktif di Washington selama lebih dari dua decade, dilaporkan ditutup karena Otoritas Palestina menolak desakan Trump untuk masuk ke perundingan perdamaian yang dipimpin Amerika. Palestina mengklaim bahwa pemerintahan Trump bias terhadap mereka dan sepenuhnya mengadopsi posisi Israel, dan mengatakan mereka hanya akan bernegosiasi di bawah mediasi forum internasional yang lebih luas. Laporan itu juga menyatakan bahwa Bolton akan mengancam untuk mengambil tindakan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag jika bergerak maju dengan penyelidikan yang difokuskan pada tindakan Israel di Gaza. Bolton juga akan mengancam untuk melarang hakim ICC memasuki Amerika Serikat dan memberi sanksi dana mereka di lembaga keuangan Amerika, jika pengadilan bertindak terhadap Amerika Serikat (Nasional, 2018).

Tahun 2017, pemerintahan Trump mengancam akan menutup delegasi PLO, menyatakan bahwa undang-undang Amerika mengharuskan perundingan Israel-Palestina yang bermakna untuk memungkinkan delegasi melanjutkan operasinya. Namun, saat itu, negosiasi antara AS dan Otoritas Palestina masih berlangsung, sehingga pemerintah berhasil menunda keputusan tentang masalah tersebut.

Dengan dinamika internal Gedung Putih yang sedemikian bergejolak, Trump kemudian dinyatakan sebagai presiden dengan perombakan paling sering di sejarah Amerika. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, pada analisa psikologi yang dikeluarkan oleh *The Atlanta* berjudul “The Mind of Donald Trump” yang membahas tentang psikologi pemimpin-pemimpin sebelum dan dibandingkan dengan Trump. Hasilnya, kepribadian Trump adalah tipe kepemimpinan yang sangat mudah terbakar, menjadi satu-satunya presiden yang tidak ramah dengan fakta, suka membuat keputusan berani yang agresif, mudah putus asa namun ingin menciptakan hasil paling baik, tinggi, bersinar serta mengagumkan, yang paling buruk adalah sukar untuk berpikir dua kali terhadap efek keputusan yang ia ambil, dan tidak memberikan jaminan atas kerusakan yang diperbuat (McAdams, 2016).

Kedekatan Trump dengan Yahudi juga ditunjukkan dalam kabinet dan penasehatnya yang berisi orang di Yahudi. Beberapa diantaranya adalah orang-orang yang mendukung “*white supremacist*”, David Duke. Beberapa orang kabinet yang berasal dari kaum Yahudi diantaranya adalah (Dolsten, 2018):

a. Jason Greenblatt

Greenblatt sebelumnya bekerja sebagai pengacara *real-estate* untuk Trump selama 19 tahun. Selain itu, Greenblatt adalah satu dari dua pengacara yang menurut Trump cocok untuk menjadi penasehat Israel. Sebagai seorang lulusan Yahudi Ortodoks dan Universitas Yeshiva dan berkuliah pada pertengahan tahun 1980 an. Greenblatt adalah ayah dari enam anak dari Teaneck New Jersey dan tidak memiliki pengalaman politik. Namun karena kedekatannya dengan kaum Yahudi, ia menjadi ahli pembuat pidato Trump yang berhubungan dengan Yahudi. Dalam urusan perdamaian antara Israel dan Palestina, Greenblatt menyatakan bahwa solusi yang disediakan Trump yang paling mungkin dilaksanakan adalah, solusi dua negara. Selain itu, ia mengatakan bahwa adanya pemukiman Yahudi bukanlah masalah penghambat terciptanya perdamaian.

b. David Friedman

Bersamaan dengan Greenblatt, Trump juga dekat dengan David Friedman yang berumur 57 tahun. Bertugas sebagai penasihat Israel. Friedman adalah ahli bisnis dan mitra dari firma hukum Kasowitz di New York dan bertugas sebagai pengacara lama dari Trump. Putra seorang rabi<sup>126</sup> konservatif dengan sejarah keluarga yang terikat dengan kandidat presiden dari partai Republik sejak tahun 1984. Pada tahun itu, Friedman menjamu Ronald Reagan untuk makan siang Shabbat<sup>127</sup> dan berhasil memenangkan Reagan dalam pemilihan ulang. Friedman tinggal di Woodmore, New York, dan memiliki rumah di lingkungan Talbiyah di Yerusalem. Friedman telah menyatakan keraguannya

tentang masa depan solusi dua negara yang secara tradisional menjadi pilar kebijakan bipartisan Amerika di wilayah tersebut. Friedman bahkan sudah mulai tidak mempercayai solusi dua negara, dalam artian Friedman beranggapan bahwa Israel dapat menjadi negara satu-satunya.

c. Jared Kushner

Kushner adalah menantu Donald Trump yang menikah dengan anaknya bernama Ivanka Trump. Kushner memerankan bagian penting dalam kampanye Donald Trump. Sebagai seorang Yahudi ortodoks ia memiliki pengetahuan yang cukup dalam berkaitan dengan Israel. Kushner mengerjakan pidato Trump di konferensi kebijakan tahunan di AIPAC yang membuat Trump mendapat tepuk tangan yang meriah. Kushner adalah anak dari pemilik usaha terkenal di Manhattan. Ia telah terbiasa dengan perhatian publik sejak berusia 25 tahun, ia telah menunjukkan keahliannya dalam melihat peluang bisnis dengan membeli koran Observer. Dua tahun kemudian ia menjadi CEO perusahaan ayahnya, *Kushner Properties*, empat tahun kemudian ayahnya masuk penjara karena penggelapan pajak, sumbangan kampanye ilegal, dan perusakan sanksi. Pada tahun 2015, Kushner dinobatkan dalam *40 Under 40* oleh Forbes, sebagai pebisnis muda dibawah 40 tahun yang berpengaruh.

d. Ivanka Trump

Ivanka adalah anak Trump yang berusia 35 tahun yang berpindah kepercayaan menjadi Yahudi Ortodoks seperti suaminya. Ivanka juga memiliki andil yang cukup besar dalam membersihkan profil Donald Trump yang saat itu tersandung skandal pelecehan seksual. Ivanka sendiri merupakan pengusaha yang sukses dan menjadi penggerak sosial dalam pemberdayaan perempuan yang bekerja. Ivanka adalah pendiri *Ivanka Trump Collection* sebuah merek *fashion* dan gaya hidup yang memiliki konsumen para eksekutif dan wakil presiden yang dikembangkan oleh *Trump Organization*. Ivanka juga masuk dalam *40 Under 40* oleh Forbes pada tahun 2014, satu tahun sebelum suaminya.

e. Boris Epshteyn

Epshteyn berusia 34 tahun adalah seorang ahli strategi partai Republik yang juga menjadi pembela Trump yang kuat dan tampil di jaringan TV sebanyak 100 kali menurut perhitungan The New York Times. Latar belakang Epshteyn sebagai mantan warga negara Rusia yang merupakan penduduk asli Moskow yang berpindah ke Amerika Serikat pada tahun 1993. Ia merupakan pembicara Rusia yang fasih dan telah memoderasi sebuah panel investasi di Moskow. Ia menjadi aset yang berharga bagi Trump karena menavigasi dan memperkuat hubungan Rusia dan Trump, terutama setelah Trump menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan dengan Presiden Vladimir Putin.

Ia juga bekerja sebagai seorang bankir investasi dan pengacara keuangan yang bemarkas di New York. Sebelumnya ia merupakan pembantu komunikasi kampanye kepresidenan Senator John McCain pada tahun 2008 yang fokus dalam upaya pada pasangan calon senator Arizona yang saat itu adalah calon senator Arizona yang juga menjabat sebagai Gubernur Alaska, Sarah Palin. Menurut laporan, Trump sedang mempertimbangkan Epshteyn sebagai sekretaris dalam negeri menurut sumber dari Politico. Namun Epshteyn tidak memiliki reputasi yang baik di antara media Amerika karena terkenal sangat agresif dan abrasif. Pada tahun 2014, Epshteyn didakwa melakukan pelanggaran ringan setelah ia terlibat dalam pertengkaran di bar. Namun, tuduhan itu dibatalkan setelah Epshteyn menjalani pelatihan manajemen kemarahan dan pelayanan masyarakat.

f. Steven Mnuchin

Mnuchin adalah seorang eksekutif Goldman Sachs, ia bekerja sebagai Ketu Keuangan Nasional Trump selama kampanye dengan tujuan mengumpulkan lebih dari



US\$ 1 miliar untuk Trump. Kerjasama antara mereka berdua telah terjalin mulai dari hubungan pertemanan mereka selama 15 tahun dan sebelum bertanggung jawab atas keuangan kampanye Trump. Mnuchin bertugas sebagai penasihat. The New York Times menggambarkan hubungan mereka sebagai “satu keluarga yang berpengaruh di Manhattan”, Mnuchin dan ayahnya menjadi kaya setelah bekerja di Goldman Sachs. Mnuchin yang lebih muda berkulat di dunia hiburan bernama *RatPac-Dune Entertainment* yang mengerjakan beberapa film *box office* seperti “*Avatar*” dan “*Black Swan*”. Beberapa orang melihat kerjasama diantara keduanya sebagai sebuah hal yang unik, mengingat Trump berusaha menghancurkan Goldman Sachs. Namun, tampaknya hal tersebut tidak menghalangi hubungan keduanya, bahkan Trump berpikir untuk menjadikan Mnuchin sebagai menteri keuangan kepada Politico Lewis Eisenberg

Eisenber kepala ekuitas swasta untuk *Granite Capital International Group* menjabat sebagai ketua keuangan untuk Komite Nasional Republik. Ia juga pengurus dari kelompok *Republican Judaism Coalition* (RJC) atau Koalisi Republik Yahudi yang memberikan kontribusi penting terhadap pencalonan Trump. Ia menjadi kontributor utama bagi kelompok-kelompok yang mendukung pemilihan Trump dan bersama Mnuchin menjadi tim suksesor pengumpulan dana. Eisenberg dibesarkan di New Jersey dan mencalonkan diri sebagai sekretaris perdagangan dalam pemerintahan Trump. Eisenberg sangat bersemangat dalam kepemimpinan Trump. Kedekatan antar keduanya dibuktikan dengan pernyataan Trump bahwa Eisenberg akan menjadi advokat yang kuat untuk Israel demi keadilan dan ketertiban.

g. Michael Glassner

Glassner bukanlah orang baru dalam kampanye presiden Republik ketika Trump menunjuknya tahun lalu untuk menjabat sebagai direktur politik nasionalnya. Ia bekerja sebagai direktur operasi wakil presiden untuk kampanye McCain 2008 dan menjalankan kampanye George W. Bush di Iowa pada tahun 2000. Glassner juga bekerja dengan Palin dan Senator Bob Dole, seorang mantan kandidat presiden. Seperti penasihat Yahudi Trump lainnya, Glassner terang-terangan mendukung Israel. Sebelum ia bergabung dengan kampanye Trump, ia bekerja sebagai direktur politik untuk *Southwest Regional AIPAC*. Glassner menyatakan fakta bahwa ia mendukung Trump karena kedekatannya dengan Palin yang memiliki persamaan nilai dengan nilai pesan politik luar negeri Trump.

Tentunya kedekatan Trump dengan para pengurus kelompok penting Yahudi ini mempengaruhi pola pikir Donald Trump. Terutama kecenderungan setiap individu yang mendukung Israel. Hal tersebut tentunya mengundang banyak reaksi. Salah satunya adalah reaksi dunia internasional mengenai Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang pada akhir 2017 memutuskan untuk memproklamirkan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Tindakan ini tentunya banyak menuai kontroversi, karena dianggap merusak citra Amerika sebagai penjaga perdamaian antara kedua negara yang berkonflik. Ancaman demi ancaman yang dilayangkan oleh negara yang kontra dengan keputusan tersebut, namun nyatanya tidak membuat Trump gentar.

Pembahasan terkait dengan kebijakan luar negeri tidak terlepas dari peran perumus kebijakan itu sendiri. Setidaknya ada dua aspek yang dapat dianalisis dari perumus kebijakan di AS yaitu legislatif dan eksekutif. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem bikameral. Lembaga legislatif AS terdiri dari Kongres dan Senat (Sayre, 1966).

Kongres merupakan anggota legislatif yang dipilih dari Partai Republik dan Demokrat, sedangkan Senat adalah anggota legislatif yang dipilih sebagai representasi negara bagian. Kedua lembaga legislatif tersebut adalah aktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Senat memiliki kuasa untuk wewenang untuk menunjuk staf diplomatik, konsuler dan personil Departemen Luar Negeri AS. Kekuatan terbesar Senat adalah dapat menolak

perjanjian, negosiasi ataupun rancangan kebijakan luar negeri yang diajukan oleh presiden. Sebuah perjanjian internasional yang diajukan oleh presiden, harus mendapatkan persetujuan dari Senat setidaknya 2/3 suara dari jumlah Senat yang menghadiri sidang di parlemen (Sayre, 1966).

Lobi-lobi politik biasanya terjadi pada proses negosiasi antara presiden dan Senat. Seorang presiden di AS setidaknya membutuhkan konsultasi dan dengar pendapat terkait ratifikasi perjanjian ataupun bantuan internasional yang diajukan olehnya. Posisi Senat dalam hal pengambilan kebijakan luar negeri sebagai representasi rakyat di negara bagian AS. Senat berhak menunda, menyetujui atau bahkan berseberangan dengan presiden jika bantuan ataupun persetujuan internasional yang diajukan presiden tidak memberikan manfaat pada masyarakat di negara bagian AS. Kesuksesan seorang presiden AS dalam merumuskan kebijakan luar negerinya terletak pada kemampuannya dalam menempatkan beberapa anggota Senat dalam proses negosiasi (Sayre, 1966).

Sebuah perumusan kebijakan luar negeri dianggap gagal jika presiden AS tidak mampu melobi Senat dalam meratifikasi sebuah kerjasama, perjanjian ataupun dukungan internasional. Ketika sebuah usulan kebijakan luar negeri AS disetujui oleh Senat, presiden dapat mengeksekusi kebijakan tersebut ataupun membuka kembali negosiasi dengan Senat ketika ada pasal dalam draft kebijakan yang harus direvisi. Pada proses negosiasi tersebut, kelompok lobi memiliki peran sebagai sumber informasi penyusunan kebijakan itu dan melobi Senat maupun presiden agar kebijakan luar negeri pemerintah AS menguntungkan kepentingan kelompok lobi tersebut. Salah satu perumus kebijakan lainnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS di legislatif adalah Kongres yang merupakan representasi partai politik seperti Republik dan Demokrat (Sayre, 1966).

Pada proses pengambilan kebijakan luar negeri, Kongres mempunyai wewenang untuk mengawasi, mengontrol dan mengajukan hak interpelasi ketika visi dan misi yang dijalankan eksekutif dalam menjalankan kebijakan luar negeri bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi AS. Kontrol penuh Kongres terhadap kebijakan luar negeri AS memang tidak secara langsung. Kongres tidak memiliki hak eksekutif seperti yang dimiliki oleh Senat. Akan tetapi, Kongres mempunyai peran yang sangat penting. Salah satunya adalah kontrol terhadap aspek finansial yang digunakan presiden dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (Sayre, 1965: 96).

Orang pertama yang berhak menentukan arah kebijakan politik luar negeri AS adalah presiden sebagai eksekutif. Sebagai commander in chief, presiden merupakan orang pertama yang menjadi tulang punggung perumusan kebijakan luar negeri. Presiden berhak menentukan siapa yang pantas menjabat staf diplomatik, mengadakan kunjungan luar negeri dan menentukan hubungan bilateral dengan Negara lain. Tentunya presiden mempunyai hak prerogatif. Hak yang dimiliki presiden salah satunya adalah mendeklarasikan perang selama hak prerogatif tersebut dapat meyakinkan Kongres dan Senat (Sayre, 1966).

Kelompok lobi Israel memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Mengacu pada hasil wawancara dengan Syukur, peneliti dari ISMES, diperoleh data bahwa kelompok lobi Israel memiliki peran penting sebagai kelompok penekan yang berusaha untuk menyeleraskan kebijakan luar negeri AS dengan kepentingan Israel. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah 60 persen dari hak veto AS digunakan untuk melindungi kepentingan negara Zionis tersebut. AIPAC merupakan salah satu dari kelompok kepentingan yang memiliki kapabilitas dalam melobi para pembuat kebijakan luar negeri di AS. Data yang diinformasikan oleh informan tersebut sesuai dengan data sekunder yang diperoleh oleh peneliti. Fortune Magazine dan A National Journal (Mearsheimer, 2008) mempublikasikan hasil risetnya pada Maret tahun 2005 yang menyatakan bahwa kelompok lobi Israel seperti AIPAC adalah kelompok lobi terkuat kedua di Amerika Serikat.

Banyak faktor pendorong yang menjadikan beberapa kelompok lobi Israel seperti, AIPAC, ADL dan ZOA sebagai kekuatan lobi terkuat. Bila mengacu pada teori Rourke tentang kelompok lobi, lobi tersebut adalah bagian dari cultural interest group. Kelompok tipe tersebut sangat kuat ikatan emosionalnya karena dipengaruhi oleh sentimen agama, ras dan budaya. Umumnya mereka bersatu padu bila menjadi kaum minoritas. Kelompok lobi Israel itu sendiri adalah minoritas di Amerika Serikat, walaupun mereka memiliki kekuatan mayoritas.

Data lain yang diperoleh dari ISMES adalah kelompok lobi Israel menggunakan pula opini publik sebagai alat lobi mereka. Opini publik yang selalu mereka gunakan adalah tentang anti-semitisme. Propaganda tentang anti-semitisme ini cukup berperan penting terhadap karir politik perumus kebijakan di AS. Mereka yang berseberangan secara politik dengan Israel akan dicap anti-semit dan ini akan berdampak pada karir politik mereka. Opini publik tersebut digunakan kelompok lobi Israel untuk melobi elite politik AS melalui media massa yang memang secara mayoritas dikuasai oleh simpatisan lainnya. Hal ini relevan dengan teori kebijakan luar negeri Lovell bahwa yang menjadi input kebijakan luar negeri adalah opini, kepentingan, kebutuhan dan permintaan. Oleh karena itu, opini adalah salah satu media yang digunakan kelompok lobi Yahudi untuk mencapai kepentingan politiknya. Keberhasilan dan efektivitas lobi Yahudi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan AS itu sendiri yang demokrasi, plural dan terbuka (Mearsheimer, 2008).

Negara yang menganut sistem demokrasi seperti AS sangat memudahkan berkembangnya aktivitas lobi itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari jaminan kebebasan berpolitik dan kebebasan berpendapat. Seperti yang diutarakan oleh Hudson pada bab sebelumnya, sistem terbuka memungkinkan kelompok lobi memiliki akses informasi. Keberadaan informasi sendiri adalah esensi penting bagi para pengambil kebijakan. Di dalam sebuah informasi terdapat needs, opinion, interest dan demands yang menjadi input bagi pembuatan kebijakan luar negeri. Hal lainnya yang menjadi input kebijakan luar negeri dalam penelitian ini adalah kepentingan. Sangatlah jelas bahwa kelompok lobi Israel memiliki kepentingan terhadap AS untuk mencapai maksud politiknya. Poin penting lainnya yang diambil dalam penelitian ini adalah kepentingan (*interest*). Kelompok lobi Israel memiliki kepentingan di Timur Tengah khususnya Palestina untuk menjaga eksistensi Israel dengan cara menginginkan adanya one state solution. Salah satu cara untuk mencapai kepentingannya adalah menggunakan power AS. Secara hard power, AS memiliki kekuatan secara politik khususnya pengaruh di Dewan Keamanan PBB. Mekanisme lobi di dalam politik domestik AS didasarkan pada kapabilitas kelompok lobi Israel untuk menyuap dan menahan karir politik oposisi yang dianggap kritis oleh Israel (Mearsheimer, 2008).

Oleh karena itu, para perumus kebijakan di legislatif dan eksekutif AS memiliki kepentingan juga dengan kelompok lobi Israel. Elite politik AS membutuhkan eksistensi mereka untuk mendukung karir politik mereka baik secara finansial atau suara pada saat pemilu. Hal lainnya yang memengaruhi efektivitas lobi Israel ini adalah kemampuan mereka untuk menempatkan kandidat-kandidat elite politik yang berpotensi menjadi mitra strategis mereka selama pemilihan umum.

Kekuatan struktur informal di dalam pemerintahan AS memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, lobi Israel sebagai bagian dari kekuatan informal mempunyai peran penting sebagai salah satu bagian dari pembuatan kebijakan luar negeri. Posisi mereka yang kuat baik secara finansial, akses politik dan melimpahnya sumber daya informasi sangat memudahkan untuk menjaga eksistensi Israel melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa kelompok lobi Israel memiliki kedekatan dengan elite politik partai di AS seperti elite politik neokonservatif yang ada di Partai Republik. Aktivitas politik neokonservatif di Partai Republik AS pada umumnya indentik dengan hegemoni, militerisme dan mereka percaya

bahwa AS perlu untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pada konstelasi global (Mearsheimer, 2008).

Secara garis besar kepentingan nasional pemerintah AS beririsan dengan Israel. Negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang buruk dengan Iran, Irak dan Palestina serta aktor transnasional seperti Al-Qaeda dan Hisbullah. Kesamaan tersebut acapkali digunakan oleh kelompok lobi Israel untuk menjadi alasan mengapa Israel perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Bila dianalisis melalui pendekatan teori pluralis, kelompok lobi Israel tersebut menggunakan isu-isu yang selalu menjadi topik khusus di Partai Republik. Secara akses politik, kelompok lobi Yahudi tersebut mempunyai simpatisan-simpatisan Israel yang berada di eksekutif dan legislatif (Mearsheimer, 2008, p. 311).

Mereka melobi para pembuat kebijakan di dalam pemerintahan AS dengan memosisikan Israel sebagai mitra strategis AS dan kedua negara tersebut memang memiliki musuh bersama. Legitimasi yang digunakan oleh kelompok lobi tersebut memudahkan kepentingan mereka untuk diakomodir oleh elite-elite politik neokonservatif. Elite politik tersebut pun memandang Israel bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sekutu dan “penjaga” kepentingan AS di Timur Tengah. Isu-isu spesifik tersebut cukup berhasil. Sebagai contoh, pemerintah AS sendiri mendukung penuh invasi Israel tersebut dan menghindarkannya dari sanksi Resolusi DK PBB 1701 ketika terjadi konflik bersenjata antara Israel dan Hisbullah di Lebanon Selatan.

Proses penutupan kantor PLO di Amerika yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proses Penutupan PLO Amerika

No	Tanggal	Kegiatan Pemerintah
1.	2 Februari 2017	Gedung Putih mengeluarkan pernyataan tentang aktivitas permukiman Israel di Yerusalem
2.	15 Februari 2017	Perdana Menteri Israel bertemu dengan Trump
3.	3 Mei 2017	Presiden Otoritas Palestina bertemu dengan Trump
4.	1 Juni 2017	Trump membuat kedutaan besar di Tel Aviv
5.	20-21 Agustus 2017	Gedung Putih mengirim delegasi ke Israel
6.	6 Desember 2017	Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel
7.	16 Januari 2018	Departemen Luar Negeri membekukan \$ 65 juta untuk program bantuan Palestina
8.	23 Februari 2018	Departemen Luar Negeri mengumumkan tanggal pembukaan kedutaan di Yerusalem
9.	14 Mei 2018	Kedutaan Besar AS untuk Israel pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem dan diresimkan
10.	19 Juni 2018	Menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
11.	10 September 2018	Administrasi Trump mengumumkan penutupan kantor PLO

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Trump ini kemudian mendukung satu belah pihak, yaitu Israel. Kecaman-kecaman yang dinyatakan dari banyak negara juga terbukti tidak menggetarkan niat Trump untuk mencabut keputusannya.

## KESIMPULAN

PLO (*Palestine Liberation Organization*) adalah organisasi gabungan dari beberapa faksi perjuangan rakyat Palestina. Organisasi ini didirikan tahun 1964 melalui Muktamar Umum Rakyat Palestina atau PNC pada 28 Mei –2 Juni 1964 di Kota Al-Quds (Yerusalem) dengan dihadiri oleh 422 representasi Palestina. Pada muktamar itu, Ahmad al-Syaqiri

terpilih sebagai Ketua PLO yang pertama 1964 s.d 1967, digantikan oleh Yahya Hamuda sampai tahun 1969, kemudian padatahun 1969 Ketua PLO dijabat oleh Yasser Arafat sampai ia meninggal pada tahun 2004.

Organisasi PLO yang didirikan sebagai entitas politik yang akan mewakili kepentingan Palestina yang berfungsi secara independen dari pemerintah Arab, awalnya sebuah organisasi yang bergerak dengan perjuangan fisik. Namun pada masa kepemimpinan Yasser Arafat (1969-2004), PLO telah mengalami perubahan perjuangan ke diplomasi. Tepatnya pada tahun 1979 dalam sidang PNC; Arafat telah diberi mandat bebas untuk berunding secara terang-terangan dengan Israel. Dengan begitu, muncul beberapa perundingan antara lain Konferensi Madrid 1991 dan Perjanjian Oslo 1993. Dan kredibilitas Arafat di kalangan rakyat Palestina tergantung kepada kemampuannya

Pada 10 September 2018, administrasi Trump mengumumkan keputusan untuk menutup kantor Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang ada di Washington DC. Kantor tersebut adalah bukti usaha perdamaian yang dihasilkan dari Kesepakatan Oslo tahun 1993-1995 yang menguraikan rencana untuk pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menjelaskan bahwa keputusan penutupan PLO itu adalah usaha perdamaian yang lebih komprehensif. Sebaliknya pemimpin PLO mengecam rencana perdamaian Amerika, serta menolak untuk terlibat dengan pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.

Saeb Erekat yang juga bekerja sebagai diplomat Palestina kemudian mengatakan bahwa ini tindakan penutupan PLO adalah bentuk penegasan dari kebijakan Administrasi Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina. Peningkatan agresi kebijakan Amerika Serikat ini menjadi berbahaya bagi Palestina. Kebijakan administrasi ini kemudian dianggap dapat membubarkan sistem internasional untuk melindungi kejahatan dan serangan Israel terhadap tanah dan rakyat Palestina serta perdamaian di sekitarnya. Aaron David Miller dari Wilson Center mengatakan bahwa keputusan untuk menutup kantor PLO, bersama dengan keputusan administrasi Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dari Tel Aviv akan merubah tatanan tradisional kedua negara yang solutif.

Konflik Palestina dengan Israel telah menjadi fokus Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan sejarah, pasca Inggris melepaskan tanggung jawab terhadap keputusannya membagi wilayah Palestina terhadap bangsa Arab dan Yahudi, dan campur tangan Amerika Serikat dalam membantu kaum Yahudi untuk meraih impiannya menegakkan negara Yahudi. Pada mulanya bantuan Amerika Serikat hanya terbatas pada bantuan moril, yakni dukungan Amerika Serikat terhadap perjanjian Balfour, yang menggambarkan keprihatinan Amerika terhadap nasib bangsa Yahudi. Namun demikian, seiring perkembangannya Amerika Serikat juga melihat keuntungan strategis dari wilayah Timur Tengah. Langkah besar yang diambil Amerika Serikat dalam mendukung bangsa Yahudi yakni dengan mengakui kedaulatan bangsa Yahudi dalam pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Selanjutnya dalam kurun waktu yang lama Amerika Serikat juga memberikan bantuan dari segi ekonomi, politik, dan militer untuk memperkuat posisi Israel di wilayah Timur Tengah. Jika ditinjau dari segi historis kedekatan Amerika Serikat dengan Israel telah berlangsung lama, hubungan historis itu membuat kepentingan kedua negara semakin berkaitan satu sama lain.

Bagi pihak Amerika Serikat sendiri kepentingan Israel telah menjelma menjadi fokus politik luar negeri Amerika Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dipengaruhi adanya lobi Yahudi yang mendominasi kancah politik Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan eksistensi Israel di Timur Tengah untuk mengukuhkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Kedekatan historis tersebut yang membuat Amerika Serikat mengimplementasikan dukungan terhadap Israel dengan membuat konstitusi yang mengatur wilayah Yerusalem

sebagai bagian dari Israel. Hal ini tertuang dalam Jerusalem Embassy Act tahun 1995, yang mengharuskan Amerika Serikat mengakui wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel. Konstitusi tersebut juga yang mendasari keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel, disertai dengan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Meskipun keputusan Donald Trump tentang Yerusalem bertolak belakang dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi bagi Donald Trump keputusan tersebut lebih menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat maupun kepentingan Donald Trump sendiri. Melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat hal tersebut pada akhirnya tetap terlaksana meskipun mendapat respon negatif dari negara lain. Kepentingan politik yang kuat untuk menjalankan konstitusi Amerika Serikat membuat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha merealisasikan keputusan pengakuan wilayah Yerusalem tersebut. Rasionalitas Presiden Donald Trump sebagai kepala negara yang lebih mendahulukan kepentingan negara juga menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan kolektif Amerika Serikat. Hal ini tentu semakin memperjelas sikap tegas Amerika Serikat yang sebenarnya dalam menangani konflik Palestina-Israel.

Keputusan penutupan Kantor PLO di Amerika juga berhubungan dengan rencana perdamaian yang akan dibuat oleh Presiden Donald Trump tentang rencana perdamaian *one state solution*. Meskipun pada dasarnya Amerika Serikat sampai saat ini masih menjadi tumpuan bagi negara Palestina dan Israel untuk merundingkan kesepakatan damai, namun agaknya dengan adanya keputusan tersebut kesepakatan damai akan mengalami hambatan kedepannya. Hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah, dan juga melemahnya legitimasi Palestina akibat tekanan yang diterima pasca keputusan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai wilayah Israel.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. (2018). *Trump akan rampungkan 'Kesepakatan Abad Ini' dalam beberapa bulan*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/trump-akan-rampungkan-kesepakatan-abad-ini-dalam-beberapa-bulan/1267123>[Diakses pada 28 Agustus 2018].
- Academy, S. H. (2017). *What is Reactive Attachment Disorder (RAD)?*, diakses di <https://www.shepherdshillacademy.org/resources/reactive-attachment-disorder-rad/>, diakses pada 28 Oktober 2019, diakses pkl. 09.15.
- Admojo, T. (2013). *First Billionaire President Donald Trump Sukses Bangkrut Bangkit jadi Presiden*. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 17.
- Alexander. (2017). *Where Did Trump's Foundation Donate It's Money? IRS Documents Reveal Surprising Answers* *Forbes*, diakses <https://www.forbes.com/sites/danalexander/2017/02/09/where-did-trumps-foundation-donate-its-money-irs-documents-reveal-surprising-answers/#478aa1e77b52>, diakses pada 23 Juli 2019,.
- Bentwich , N. (1928). *Journal of Comparative Legislation and International Law. Palestine, 10(3)*, 172-177. Retrieved 03 28, 2019 , from <https://www.jstor.org/stable/753528>
- Cook , T. I., & Moos , M. (1953, march). *The American Political Science Review. The American Idea of International Interest, 47(1)*, 28-44. Retrieved 03 28, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/1950956>
- Gibson, J. (1939, december). *Supervised Correspondence Study. International Interest, 22(4)*, 173-177. Retrieved 03 28, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/20259006>
- rashid, h. (28-03-2019). *Journal of Palestine Studies, Vol. 4, No. 4 (Summer, 1975)*, pp. 90-109. *What is the PLO?*, 90-109. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/2535603>
- Rolef, S. H. (1987). *Journal of Palestine Studies. What to do about the PLO, 16(3)*, 205-207. Retrieved 03 28, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/2536813>
- Salim, y. (2018, sep 12). *Pemerintah AS Menutup Kantor Misi Diplomatik PLO di Washington DC* . *washington DC: VOA*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-as-menutup-kantor-misi-diplomatik-plo-di-washington-dc/4567572.html> (diakses 31/03/2019)
- Syuib, M. (2016). *NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 1(1)*, 39-49.
- Beaumont, P. (2016). *"Trump has „every intention“ of recognizing Jerusalem as Israel Capital"*. <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/09/israel-donald-trump-netanyahu-jerusalem>, diakses pada 25 Januari 2019. Pkl. 13.54.
- Cordesman, A. H. (2017). *The Strategic Impact of Making Jerusalem the Capital of Israel*. CSIS: diakses di <https://www.csis.org/analysis/strategic-impact-making-jerusalem-capital-israel>, diakses pada 27 Mei 2019, diakses pkl 15.37.
- Detik. (2017). *9 Negara Tolak Resolusi PBB Soal Yerusalem, Takut Ancaman Trump?* DetikNews: <https://news.detik.com/internasional/d-3781082/9-negara-tolak-resolusipbb-soal-yerusalem-takut-ancaman-trump>[Diakses pada 11 Agustus 2018] .
- Dolsten, J. (2018). *"Meet the Jews in Donald Trump's Inner Circle"*. *Jewish Post & News*: diakses di <https://www.jewishpostandnews.ca/features/2209-meet-the-jews-in-donald-trump-s-inner-circle>, diakses pada 15 Juni 2019, diakses pukul 17.08.

- Drucker, S. E. (2017). *Trump's Business Ties to Middle East Precede Him*. Diakses di <https://www.nytimes.com/2017/05/18/us/politics/trumps-business-ties-to-middle-east-precede-him.html>. Diakses pada 25 Januari 2019, pkl. 13.48.
- Findley, P. (1990). *Deliberate Deceptions: Facing The Facts about the US-Israeli Relationship*. Terjemahan: Rahmani Astutui. Bandung: Mizan.
- JPOST. (2016). *Adelson To Republican Jewish Leaders: Support Trump*. The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/US-Elections/Sheldon-Adelson-backs-DonaldTrump-says-hes-good-for-Israel-453328>[Diakses pada 9 November 2018] .
- Kumoro, B. (2009). *Hamas Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*,. Bandung: Mizan Cetak I, h. 66.
- McAdams, P. (2016). *"The Mind of Donald Trump, Narcissism, disagreeableness, grandiosity- a psychologist investigates how Trump's Extraordinary Personality might Shape his Possible Presidency"*,. The Atlanta: diakses <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/>, diakses pada, 11 Mei 2019, diakses pada 03.02.
- Mearsheimer, W. (2008). *The Israel Lobby and U.S Foreign Policy*. New York: Farrar, Starus and Giroux.
- MEE. (2016). *No matter who wins the US election, the door stays shut to Palestinians*. Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/essays/no-matter-who-wins-us-election-door-stays-shut-palestinians-1051321472>[Diakses pada 7 September 2018].
- Nasional, H. (2018). *Amerika Tutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington*. <http://harnas.co/2018/09/10/amerika-tutup-kantor-organisasi-pembebasan-palestina-di-washington>.
- Piper. (2008). *The New Jerussalem: Zionist Power in The United States*. Terjemahan: Renvilia. . Bandung: Planet Buku.
- politik, m.-m. (2018). *Amerika Tutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington*. <https://www.matamatapolitik.com/amerika-tutup-kantor-organisasi-pembebasan-palestina-di-washington/>.
- Post, T. W. (2017). *In 1995, Congress reached a compromise on the issue of Jerusalem. Trump is poised to end it*. [https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-ispoised-to-end-it/?utm\\_term=.44cfd6904a63](https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-ispoised-to-end-it/?utm_term=.44cfd6904a63) [Diakses pada 29 Mei 2018] .
- Republika. (2015). *AS-Israel Berencana Bentuk Peta Baru Timur Tengah*. . Republika: [https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/07/nvt7dl31\\_3-asisrael-berencana-bentuk-peta-baru-timur-tengah](https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/07/nvt7dl31_3-asisrael-berencana-bentuk-peta-baru-timur-tengah)[Diakses pada 20 September 2018] .
- Robinson, M. (2017). *"Trump sau this private boarding school gave him more military training than Army could"*, *Business Insider Singapore*,. <https://www.businessinsider.sg/donald-trump-military-service-boarding-school-2017-4/?r=US&IR=T>, diakses pada 9 Oktober 2019, diakes pkl. 14.45.
- Sayre. (1966). *American Government*. New York: Barnes & Noble Inc.



- SindoNews. (2017). *Tunaikan Janji soal Yerusalem, Trump Ledek Clinton, Bush dan Obama*. <https://international.sindonews.com/read/1263994/42/tunaikan-janji-soalyerusalem-trump-ledek-clinton-bush-dan-obama-1512720129>[Diakses pada 26 September 2018].
- Smith, D. (2018). *Mommy Dearest: A psychiatrist puts Donald Trump on a couch, the Guarrdian*,. <https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/29/trump-on-the-couch-justin-frank>, diakses pada 28 Juni 2019, diakses pkl. 01.48.
- tirto.id. (2018). *Lobi Grup Zionis AS di Balik Keputusan Trump soal Yerusalem*. <https://tirto.id/lobi-grup-zionis-as-di-balik-keputusan-trump-soal-yerusalem-cBzo>.
- Unknown. (2018). *Federal Policy on Israel and Palestine, 2017-2018, Ballotpedia*. diakses di [https://ballotpedia.org/Federal\\_policy\\_on\\_Israel\\_and\\_Palestine,\\_2017-2018](https://ballotpedia.org/Federal_policy_on_Israel_and_Palestine,_2017-2018), diakses pada, 21 Mei 2019, diakses pkl. 15.48.
- Waxman, O. B. (2017). *The 1995 Law Behind President Trump's Plan to Move the US Embassy in Israel to Jerusalem*. TIME, Amerika: diakses di <http://time.com/5049019/jerusalem-embassy-history/>, diakses pada 27 Mei 2019, diakses pkl 14.00.
- www.voaindonesia.com. (2018). <https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-antisemitisme-intimidasi-kaum-yahudi-lewat-twitter-/4384150.html>.